



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15041-15050

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Aplikasi E-Katalog Lokal Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Feni Angraini<sup>1✉</sup>, Asna Aneta<sup>2</sup>, Muhtar Ahmad<sup>3</sup>

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [yheyhasin06@gmail.com](mailto:yheyhasin06@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Dalam upaya pemerintah melalui modernisasi pengadaan yaitu dengan cara pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi E-katalog Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan implementasi E-katalog lokal di Kabupaten Gorontalo Utara belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh, (2) Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang pengadaan barang dan jasa masih sangat sedikit. (3) Disposisi/Sikap yang baik sudah diterapkan dalam proses implementasi Aplikasi E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. (4) Dalam struktur birokrasi pembagian tugas dalam implementasi Aplikasi E-katalog sudah sangat jelas namun belum merata, adanya SOP juga sudah sangat membantu perangkat daerah untuk menjalankan implementasi aplikasi E-katalog.

Kata Kunci: *E-Katalog, Pengadaan, Implementasi*

## Abstract

In the government's efforts through modernization of procurement, namely by procuring goods and services through E-Purchasing. The purpose of this research is to find out how the implementation of the E-catalog application of North Gorontalo Regency Regional Devices. The research used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques Observation, Interview and Documentation. The results showed that (1) Communication established in the implementation of local E-catalog implementation in North Gorontalo Regency has not been fully implemented as a whole, (2) Human resources who have competence in the field of goods and services procurement are still very few. (3) Good disposition/attitude has been applied in the implementation process of the local e-catalog application for regional equipment in North Gorontalo Regency. (4) In the bureaucratic structure, the division of tasks in implementing the E-catalog application is very clear but uneven, the existence of SOPs has also been very helpful for regional apparatus to carry out the implementation of the E-catalog application.

Keyword: *E-Catalog, Procurement, Implementation*

## PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, sehingga diperlukan suatu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hupe & Hill (2022) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan Katalog elektronik Lokal adalah Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu dari 4 (empat) daerah yang menjadi percontohan penerapan Katalog elektronik Lokal, termasuk Kabupaten Gorontalo Utara. Katalog elektronik lokal telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan diterbitkannya Instruksi Bupati Gorontalo Utara Nomor 321 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pemanfaatan E Katalog Lokal di Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan Instruksi Bupati Gorontalo Utara tersebut, maka proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap OPD diharapkan akan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, tercatat secara elektronik agar Mempercepat proses penyerapan anggaran.

Penerapan Katalog elektronik pada pemerintahan memang mempunyai hasil yang beragam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestyowati (2018) menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan katalog elektronik. Belum semua barang dan jasa yang dibutuhkan satker terdapat dalam katalog elektronik. Masih adanya biaya lain diluar harga yang tertera dalam katalog tersebut. Pada beberapa situasi, harga yang ditawarkan dikatalog elektronik lebih tinggi dibandingkan dengan di tempat lain. Sebagian besar pejabat pengadaan mengaku mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan E-

Purchasing, namun ada beberapa pengalaman kurang menyenangkan yang mereka alami. Hal serupa juga diungkapkan Ariesta (2021) bahwa pengadaan barang dan jasa E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019 berjalan efektif namun belum optimal dalam penerapannya. Kurang efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan adanya indicator-indicator, antara lain produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan.

Selain informasi jenis penyedia dalam Katalog elektronik lokal terdapat 2178 produk yang tayang dengan jumlah penyedia Usaha Mikro sebanyak 35 Penyedia, Usaha Kecil 25 Penyedia, Usaha menengah 4 Penyedia dan Non UMKM 18 Penyedia jika dilihat masih sedikit jumlah penyedia yang mendaftar pada e-katalog lokal Kabupaten Gorontalo Utara. Bukan hanya informasi jenis penyedia namun terdapat juga informasi tentang etalase produk, Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa adalah bagian yang bertanggung jawab menyiapkan etalase produk. Dua puluh tiga (23) etalase produk seperti makan minum, alat tulis kantor, jasa keamanan dan jasa kebersihan sudah disediakan oleh Unit Pengadaan Barang dan jasa namun masih banyak penyedia yang belum mendaftarkan produknya dapat dilihat dari banyaknya etalase yang belum terisi. Hal ini diakibatkan kurangnya informasi tentang E-katalog lokal yang diterima penyedia lokal. Bukan hanya itu, masalah lain yang ditemukan berdasarkan data yang diambil dari aplikasi katalog elektronik lokal pada tanggal 24 oktober 2023 terlihat bahwa dari 31 ( Tiga Puluh Satu) Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara hanya 13 (Tiga Belas) Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan pembelian barang/jasa yang menggunakan metode E-Purchasing pada Aplikasi Katalog elektronik lokal hal itu disebabkan sebagian besar perangkat daerah masih menggunakan metode pembelian barang secara konvensional atau dengan metode tender yang prosesnya paling cepat 30 hari kalender. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten serta pembagian tanggung jawab yang tidak merata dalam proses pengadaan barang dan jasa turut berperan penting menyebabkan implementasi Aplikasi E-katalog lokal tidak terlaksana dengan baik. Hal ini mengakibatkan lambatnya proses penyerapan anggaran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

## METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kabupaten Gorontalo Utara, dengan berfokus pada beberapa lokasi yang relevan untuk dijadikan sebagai obyek penelitian yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara.

Pada pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat

kualitatif dengan mendeskripsikan, mengetahui, serta menganalisis bagaimana Implementasi Aplikasi E-katalog lokal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian ini yaitu deskriptif, Memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada serta memfokuskan pada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung mengenai tentang Implementasi Aplikasi E-katalog lokal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Data primer dari penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan yang masing-masing adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pejabat Pengadan/Pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pejabat fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan data sekunder berupa dokumen, laporan, data dari aplikasi E-katalog lokal, dan data lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yang mengacu pada penelitian oleh Yoriana (2018), dimana terdapat tiga tahapan analisis data yakni data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara melalui kroscek data lapangan yang dilakukan mengenai aspek komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, aspek komunikasi berperan penting dalam implementasi E-katalog lokal. Salah satunya dengan cara komunikasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan tentang materi bagaimana penerapan E-katalog lokal disetiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Implementasi E-katalog ini telah dilakukan komunikasi dengan baik agar perangkat daerah memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas yang akan dikerjakan.

Dampak lain temuan riset ini menunjukkan sosialisasi tidak dilakukan secara kontinue, sehingga hanya ada beberapa perangkat daerah yang lebih cepat memahami dan mampu mengimplementasikan E-katalog. Misalnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara yang sudah berhasil mengimplementasikan E-katalog lokal dengan baik. Selain sosialisasi terhadap perangkat daerah, sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan pelaku usaha lokal (penyedia) di Kabupaten Gorontalo Utara. Sesuai dengan hasil temuan dilapangan banyak pelaku usaha lokal yang belum mendaftarkan perusahaanya di E-katalog lokal. Hal ini terlihat jelas banyak etalase-etalase prodak yang sudah disiapkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa masih belum terisi. Hal ini akan menghambat proses implementasi E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara

perintah untuk mengimplementasikan E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara sudah disampaikan secara tepat dan berulang dengan keluarnya peraturan presiden 16 tahun 2018 dan perubahannya peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa serta dikeluarkannya instruksi Bupati No 321 tentang percepatan E-katalog lokal di kabupaten Gorontalo Utara.

Walaupun ada perintah yang jelas untuk mengimplementasikan E-katalog lokal, namun tetap ada penolakan dari perangkat daerah yang menyatakan belum siap beralih ke E-katalog lokal. Salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara yang sampai sekarang masih tetap melakukan pengadaan barang dan jasa secara manual dan tidak menjalankan perintah implementasi E-katalog lokal.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hamzah & Ismail (2021) yang membuktikan bahwa faktor pendukung komunikasi sangat penting karena para pelaksana harus memahami tugas yang akan dijalankan agar proses implementasi berjalan dengan efektif, dengan komunikasi yang baik dan lancar kepada semua pihak yang berkepentingan akan mendukung pelaksanaan program. Begitupula Para pelaksana kebijakan harus menyampaikan instruksi untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat dan konsisten kepada aparat melalui komunikasi yang dijalani dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sika et al. (2022) yang menjelaskan bahwa aspek komunikasi adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu kebijakan, dengan demikian diharapkan dapat efektif terhadap orang-orang yang menerima informasi sehingga dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur secara tepat waktu dan akurat.

Dalam implementasi E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, komunikasi belum optimal sebagaimana tergambar dari fenomena yang telah disebutkan di atas dan teori ahli komunikasi. Disebabkan komunikasi dalam sosialisasi hanya sekali terjadi pada tahun 2022 dan sekali diawal tahun 2023 itupun tidak melibatkan pelaku usaha (penyedia) tidak terjalin komunikasi yang baik antara pelaku usaha (penyedia) dengan Perangkat daerah kabupaten Gorontalo utara padahal mereka juga berperan penting dalam implementasi E-katalog lokal. Kurangnya pemahaman dikarenakan tidak maksimalnya komunikasi akan menyebabkan implementasi e-katalog tidak akan berjalan dengan baik sementara implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik bila unsur kejelasan arahan dari pengampu kebijakan kepada implementor dapat terpenuhi.

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dilapangan mengenai aspek sumber daya sangat berperan penting dalam implementasi aplikasi E-katalog lokal perangkat daerah kabupaten Gorontalo Utara. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia atau manusia yang berkompentensi untuk melakukan proses implementasi aplikasi E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Uatara masih

sangat kurang dan fakta lainnya adalah hanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa minimal level 1 yang bisa memproses E-katalog lokal. Hal ini sesuai dengan apa yang di dapat dengan mewawancarai setiap Aparatur Sipil Negara yang bersinggungan langsung dengan proses implementasi Aplikasi E-katalog Lokal. Karena kurangnya sumber daya yang berkompentensi menyebabkan setiap perangkat daerah yang ingin melakukan proses E-katalog lokal harus meminta bantuan Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa untuk merekomendasikan pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen untuk diperbantukan ke Dinas-dinas yang membutuhkan.

Fakta dilapangan ada 31 (tiga puluh satu) perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yang harus dibantu oleh Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa belum lagi ditambah dengan Kecamatan dan Puskesmas yang tidak mempunyai pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen. Padahal hanya ada 9 (Sembilan) pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dan 5 (lima) staf yang memiliki kompetensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini bisa menyebabkan setiap personil yang berkompentensi bisa memiliki tugas ganda yaitu harus menjadi pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di beberapa dinas, hal ini akan menjadikan implementasi E-katalog lokal tidak terimplementasi dengan baik.

Selain sumber daya manusia Sumber daya insentif atau finansial tentu sangat berpengaruh terhadap implementasi E-katalog perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dukungan berupa finansial daerah juga sangat diperlukan karena untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibutuhkan dana dari daerah begitupun dengan insentif hal ini dikarenakan pelaku pengadaan barang dan jasa dan pejabat pembuat komitmen memiliki pekerjaan yang sering berbenturan dengan hukum, jadi sumber daya insentif sebagai motifasi untuk meningkatkan kinerja para pelaku pengadaan barang dan jasa .

Sumber daya sangat penting dan berpengaruh hal ini sejalan dengan hasil penelitian Akbar (2019) bahwa sumber daya masih menjadi masalah utama yang harus diatasi untuk dapat mendukung implementasi kebijakan dimana para anggota birokrasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Diperlukan sumber daya yang memadai untuk setiap proses yang dilakukan. Dalam konteks kehidupan nyata, penerapan program kebijakan membutuhkan ketersediaan sumber dana, tenaga kerja, dan sarana yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Ketidakefektifan penerapan kebijakan dapat terjadi karena kurangnya sumber daya yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun jika aparat pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk

melaksanakan isi kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Selain itu hasil penelitian Ramadannisa (2023) juga membuktikan bahwa bahwa Sumber daya meliputi sumber daya manusia, seperti kompetensi aparat pelaksana, dan sumber daya finansial. Dalam konteks ini, sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas dan tidak dapat dijalankan dengan baik, sementara keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau insentif. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau insentif mengakibatkan keterlibatan yang kurang dari perangkat daerah sebagai pelaku kebijakan dan menghambat kelancaran implementasi E-katalog lokal. Fenomena ini relate dengan yang terjadi di Perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Sumber daya yang berkompotensi masih kurang dan sumber daya insentif atau finansial yang masih terbatas sehingga menyebabkan beberapa perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara belum mengimplementasikan E-katalog lokal sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perangkat daerah tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo Utara, kami menilai bahwa sikap atau disposisi pelaksanaan dalam penerapan kebijakan implementasi E-katalog lokal sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh para pelaku implementasi E-katalog lokal. Seperti yang ditemukan dalam wawancara dengan pelaku pengadaan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan memiliki komitmen akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas melakukan proses pengadaan barang dan jasa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat hambatan atau keterbatasan pemahaman terhadap hal-hal yang belum diketahuinya pada implementasi ekatalog ini, maka yang bersangkutan akan berupaya memperbarui kapasitas dirinya dan belajar lebih keras lagi bersama orang lain atau dari narasumber-narasumber serta mempelajari modul-modul yang disediakan oleh pengambil kebijakan (LKPP). Pelaku pengadaan pelaksana ekatalog akan cenderung mengungkapkan fakta atau data yang sesuai pada aplikasi ekatalog serta menerapkan proses ekatalog tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam sikap demokratis pelaku pengadaan dalam tahapan revidi persiapan pengadaan, akan berkonsultasi dan meminta pendapat orang lain, karena tahapan ini dibutuhkan masukan dan saran dari pihak berkompotensi terkait proses pengadaan barang/jasa.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melihat bahwa E-katalog lokal sebagai alat yang dapat membantu mempermudah pekerjaan mereka, mengurangi beban administrative dan bahkan mempercepat proses pengadaan dan mendorong UMKM. Ini sangat berbeda dengan pandangan perangkat

daerah yang melihat bahwa dengan diterapkannya E-katalog lokal akan merubah prosedur yang sudah ada dan mereka harus memperluas keterampilan teknis yang diperlukan atau ketidakpastian tentang bagaimana system yang baru akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini sangat mempengaruhi implementasi Aplikasi E-katalog lokal.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nugraha & Supriyoso (2021) membuktikan bahwa adanya komitmen yang ditanamkan diri sendiri merupakan bentuk kesadaran SDM dalam menduduki jabatan struktural. Namun demikian, adanya komitmen harus diiringi dengan bukti kongkret bahwa para pelaksana berkomitmen dalam mengimplementasikannya, dalam hal ini seluruh pelaksanaan kebijakan terekam secara otomatis dalam system, maka dari itu jika ada yang tidak sesuai dengan kebijakan maka akan terlihat, namun apabila aparat pelaksana menunjukkan disposisi atau sikap yang positif dalam menjalankan tugas, implementasi kebijakan akan berlangsung sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

Selain disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi e-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti pada pembagian tugas untuk melaksanakan proses E-katalog perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilakukan dengan baik hanya saja kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi sehingga pelaku pengadaan bisa merangkap mejadi pejabat pengadaan lebih dari 3 (Tiga) Dinas sekaligus dan ini akan membuat lambatnya proses pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa.

Selain pembagian tugas dan tanggung jawab hal krusial lainnya yaitu tersedianya SOP sebagai panduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Faktanya standar operasional proses pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog lokal perangkat daerah sudah ada , namun pelaku implementasi kebijakan mengabaikannya maka hal ini juga akan menghambat proses implementasi Aplikasi E-katalog lokal. Kasus yang peneliti dapat dilapangan bahwa pada saat ingin mengadakan barang untuk keperluan kantor, para pelaku pengadaan ini tidak memastikan apakah pelaku usaha (penyedia) sudah mendaftarkan produknya di etalase yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah padahal ini sudah dijelaskan dalam SOP yang ada. Hal terakhir yang paling mempengaruhi pada saat pembuatan etalase, penyedia harus bersurat ke pokja yang berada di Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara , setelah itu pokja akan menindak lanjuti dengan mengirimkan surat ke LKPP. Proses struktur birokrasi yang panjang menghambat proses implementasi Aplikasi E-katalog perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Hal ini senada dengan penelitian Hamzah & Ismail (2021) dimana struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan dalam

melaksanakan kebijakan, karena kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal yang menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

#### SIMPULAN

Implementasi aplikasi E-katalog lokal di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan beberapa temuan. Komunikasi belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan keterlibatan pelaku usaha lokal, menghambat pertumbuhan UMKM. Sumber daya manusia terbatas dan tidak terdistribusi secara merata, serta kurangnya insentif bagi pejabat pengadaan. Meskipun disposisi yang baik telah diterapkan, perbedaan pendapat dan pemahaman terhadap peraturan mempengaruhi proses. Struktur birokrasi yang belum merata dan perlu pemahaman yang lebih baik tentang SOP menyebabkan hambatan dalam implementasi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi, mendistribusikan sumber daya secara merata, memberikan insentif, dan meningkatkan pemahaman tentang peraturan untuk mengoptimalkan implementasi E-katalog.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2019). The influence of product quality and price on purchasing decisions at MITRAINDO South Tangerang Online Shop. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(2), 237–248.
- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172.
- Hamzah, K., & Ismail, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E Purchasing Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(1), 429–438.
- Hupe, P., & Hill, M. (2022). The street level of the welfare state. In *A Research Agenda for Social Welfare Law, Policy and Practice* (pp. 283–301). Edward Elgar Publishing.
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (STUDI KASUS SATKER KEMENTERIAN KEUANGAN). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 669–695.
- Nugraha, D., & Supriyoso, P. (2021). Analisis Faktor-faktor Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Klinik Pratama Marlina. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen*

*Dan Akuntansi*, 4, 408–416.

Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 6(1), 109–128.

Sika, K., Hermanto, H., & Susanto, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap Kerja Terhadap Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dikecamatan Palibelo. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 914–928.

Yoriana, D. (2018). Pelaksanaan Kearsipan Oleh Bagian Kesekretariatan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 614–620.